

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimpulan

Kegiatan diplomasi antara Pemerintah Timor Leste dan pemerintah negara-negara anggota ASEAN untuk pengajuan keanggotaan tetap dan penuh ASEAN untuk negara Timor Leste, merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Pemerintah Timor Leste, berdasarkan definisi dari kebijakan luar negeri itu sendiri, yaitu tujuan-tujuan umum yang memandu kegiatan suatu negara dalam interaksinya dengan negara-negara lain, yang perkembangannya dipengaruhi oleh pertimbangan dalam negeri, perilaku negara lain, atau rencana-rencana untuk memajukan desain geopolitik tertentu atau untuk mempromosikan kepentingan nasional di luar batas wilayah suatu negara, yang dikeluarkan oleh para pejabat pemerintah suatu negara secara eksplisit maupun implisit (Nolen, 2009, Amstutz, 1998). Adapun, kepentingan nasional Timor Leste, yang berfungsi sebagai tujuan fundamental sekaligus faktor penentu akhir bagi para pembuat kebijakan luar negeri tersebut dari Pemerintah Timor Leste (Plano & Olton, 1999), adalah keanggotaan tetap dan penuh ASEAN untuk negara Timor Leste. Dengan mempertimbangkan teori kepentingan nasional, serta berbagai alasan signifikan mengapa penting bagi Timor Leste untuk segera mendapatkan keanggotaan ASEAN-nya, seperti yang telah dijelaskan di dalam bagian latar belakang, yang terletak pada bab pendahuluan, peneliti berpendapat bahwa pengajuan keanggotaan tetap dan penuh ASEAN untuk negara Timor Leste merupakan kepentingan nasional yang berhubungan dengan unsur-unsur pembentuk kebutuhan negara Timor Leste yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi (Plano & Olton, 1999), yang turut memengaruhi keberlangsungan negara dan masyarakat Timor Leste, khususnya pada bidang politik, ekonomi, maupun sosial.

Menurut peneliti, dalam sudut pandang teori permainan atau *game theory* (Correa, 2001, Snidal, 1985, Poundstone, 1992, von Neumann & Morgenstern, 1944, Ross, 2021, Murray *et. al.*, 2013), kegiatan diplomasi antara Pemerintah Timor Leste dengan negara-negara anggota ASEAN untuk proses pengajuan keanggotaan tetap dan penuh ASEAN bagi negara Timor Leste, khususnya pada

rangkaian kegiatan yang terjadi pada tahun 2018 hingga tahun 2022, secara keseluruhan, merupakan kebijakan luar negeri yang menghasilkan *positive-sum game* yang bersifat saling menguntungkan satu sama lain di antara kedua belah pihak yang berkepentingan, tanpa mengorbankan pihak manapun.

Selain itu, peneliti juga berkesimpulan bahwa Pemerintah Timor Leste menggunakan model kebijakan luar negeri yang bersifat poliheuristik, dalam kegiatan-kegiatan diplomasinya, berdasarkan pada pemahaman kognitif masing-masing pengambil kebijakan di dalam Pemerintah Timor Leste untuk menyederhanakan keputusan-keputusan mengenai diplomasi untuk pengajuan keanggotaan tetap dan penuh ASEAN yang bersifat kompleks, melalui proses pemilahan terhadap berbagai alternatif kebijakan luar negeri menjadi dua jenis, yaitu alternatif kebijakan yang ditolak berdasarkan dimensi kritis, serta alternatif kebijakan yang diterima dengan penerimaan keuntungan semaksimal mungkin serta pengurangan risiko-risiko seminimal mungkin yang terjadi dari implementasi kebijakan-kebijakan luar negeri yang ada (Mintz, 1997, Mintz & DeRouen, 2010, Mintz & Sofrin, 2017). Peneliti berpendapat bahwa hal tersebut turut memengaruhi bagaimana Pemerintah Timor Leste mengatur prioritas diplomasi dengan negara-negara anggota ASEAN. Seperti yang telah terlihat, Pemerintah Timor Leste paling banyak melakukan diplomasi kepada Pemerintah Indonesia dibandingkan kepada negara-negara anggota ASEAN lainnya selama tahun 2018 hingga tahun 2022. Pola yang dilakukan Pemerintah Timor Leste tersebut, juga terjadi sebelum tahun 2018, bahkan sejak usaha pengajuan keanggotaan tetap dan penuh ASEAN dari Pemerintah Timor Leste dilakukan pertama kali pada tahun 2011. Namun, Pemerintah Timor Leste juga memiliki banyak agenda diplomasi dengan Pemerintah Singapura selama tahun 2018 hingga tahun 2022, khususnya terkait dengan *summit diplomacy* dan diplomasi ulang-alik (*shuttle diplomacy*).

Selanjutnya, berdasarkan pemaparan deskripsi data mengenai diplomasi Pemerintah Timor Leste dalam usaha pengajuan keanggotaan tetap dan penuh ASEAN untuk negaranya, disertai dengan pertimbangan-pertimbangan terhadap teori-teori diplomasi berdasarkan jenisnya yang telah dikaji dari berbagai literatur, maka peneliti menemukan bahwa Pemerintah Timor Leste telah melakukan diplomasi ulang-alik (*shuttle diplomacy*), diplomasi publik, diplomasi sosial (*social*

diplomacy), diplomasi kebudayaan (*cultural diplomacy*), diplomasi humanitarian, diplomasi terbuka (*open diplomacy*), *hard power diplomacy*, *diplomasi soft power*, serta diplomasi silang (*cross diplomacy*) dengan pemerintah negara-negara anggota ASEAN selama tahun 2018 hingga tahun 2022. Kemudian, Pemerintah Timor Leste lebih sering melakukan diplomasi *summit*, serta diplomasi *soft power* dengan pemerintah negara-negara anggota ASEAN, dalam usahanya untuk menjadi anggota tetap ASEAN.

Peneliti menemukan Pemerintah Timor Leste sering mengadakan *summit diplomacy* dengan pemerintah negara-negara anggota ASEAN, dalam usahanya untuk menjadi anggota tetap ASEAN, berdasarkan riwayat berbagai kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh para pejabat Pemerintah Timor Leste, mulai dari Presiden, Perdana Menteri, Duta Besar, hingga Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama, serta para pejabat lainnya, khususnya di dalam Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Timor Leste, maupun utusan-utusan kenegaraan lainnya yang telah ditunjuk dan diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah Timor Leste, terhadap pemerintah dan masyarakat negara-negara anggota ASEAN yang lain. Kegiatan-kegiatan *summit diplomacy* yang dilakukan oleh Pemerintah Timor Leste terhadap pemerintah negara-negara anggota ASEAN, umumnya juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan diplomasi ulang-alik (*shuttle diplomacy*) yang dilakukan oleh para pejabat Pemerintah Timor Leste ke wilayah-wilayah negara anggota ASEAN lainnya.

Selanjutnya, peneliti juga menemukan Pemerintah Timor Leste sering mengadakan *soft power diplomacy* dengan pemerintah negara-negara anggota ASEAN. Pemerintah Timor Leste melakukan jenis diplomasi tersebut pada berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan berdasarkan kemampuan para pejabatnya untuk mendorong negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk menindaklanjuti pengajuan keanggotaan tetap dan penuh ASEAN-nya melalui pengaruh ekonomi, kebudayaan serta ideologi, sehingga pikiran dan hati pemerintah-pemerintah negara anggota ASEAN menjadi takluk terhadap pengaruh-pengaruh tersebut. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan diplomasi *soft power* Pemerintah Timor Leste dapat digolongkan kembali diplomasi publik, diplomasi sosial (*social diplomacy*), diplomasi kebudayaan (*cultural diplomacy*), termasuk

diplomasi yang dilakukan antar institusi pendidikan khususnya institusi pendidikan tinggi dan lembaga-lembaga akademis lainnya, diplomasi humanitarian, seperti kebijakan Pemerintah Timor Leste, dengan dukungan subsidi sebesar US\$750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) untuk penanganan insiden jebolnya bendungan pembangkit listrik tenaga air Xe-Pian Xe-Namnoy di Provinsi Attapeu, Laos pada tahun 2018, yang telah menerima apresiasi dari Pemerintah Laos (Kementerian Luar Negeri Laos, Juni 2019), serta diplomasi terbuka (*open diplomacy*), menurut definisi yang telah ditetapkan di dalam teori diplomasi (Abdurahmanli, 2021).

Selain itu, berdasarkan pemaparan deskripsi data mengenai diplomasi Pemerintah Timor Leste dalam usaha pengajuan keanggotaan tetap dan penuh ASEAN untuk negaranya, disertai dengan pertimbangan-pertimbangan terhadap teori-teori diplomasi berdasarkan konsep-konsep menurut *tracks* atau pengandaian proses penciptaan perdamaian sebagai sebuah sistem yang hidup (Jeffrey Mapendere, 2006), yang telah dikaji dari berbagai literatur, maka peneliti telah menemukan bahwa Pemerintah Timor Leste telah melakukan *track-one diplomacy* atau diplomasi resmi (*official diplomacy*), pada setiap kegiatan diplomasi yang penerapan formalnya ada di tingkat negara (*state-to-state*) dengan melibatkan para diplomat pejabat tinggi pemerintah dan kepala negara, serta ditujukan untuk memengaruhi struktur kekuasaan politik (Jeffrey Mapendere, 2006, De Magalhaes, 1988). Selain itu, Pemerintah Timor Leste juga *track-two diplomacy* atau diplomasi jalur kedua dan *track one and a half diplomacy* pada kegiatan-kegiatan diplomasi *soft power*.

Dengan mencermati pula masing-masing sejarah politik luar negeri masing-masing negara anggota ASEAN, di mana pada rangkaian sejarah masing-masing momen diplomatik tersebut, telah diperlihatkan kepada peneliti bahwa banyak kesamaan di antara proses pembangunan hubungan bilateral antar negara anggota ASEAN, dengan proses pembangunan hubungan bilateral antara negara-negara anggota ASEAN dengan Timor Leste pada era reformasi, terutama sejak restorasi kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002, bersamaan dengan keunikan proses pembangunan pada masing-masing fenomena diplomatik tersebut, yang menyebabkan proses-proses tersebut, turut berkontribusi pada dinamika-dinamika

yang terjadi di dalam ASEAN, peneliti menganggap bahwa proses pengajuan keanggotaan tetap dan penuh ASEAN untuk Timor Leste juga sangat dipengaruhi oleh pemahaman sejarah masing-masing negara anggota ASEAN, seperti bangsa Indonesia yang hidup dengan Pemerintah Indonesia pada era reformasi, dalam perwujudan representasi diplomatik masing-masing negara beserta dengan kegiatan-kegiatannya, termasuk Pemerintah Timor Leste. Peneliti mencermati bahwa pemahaman sejarah masing-masing negara anggota ASEAN terhadap Pemerintah Timor Leste dan kepentingan nasionalnya untuk bergabung dengan ASEAN secara tetap dan penuh dapat dijelaskan dengan model kebijakan luar negeri poliheuristik, di mana pemerintah-pemerintah negara-negara ASEAN juga menggunakan proses-proses kognitif, selain hal-hal yang bersifat rasional, yang mengandalkan pembelajaran terhadap apa yang sebenarnya terjadi menurut sejarah, terutama terkait dengan Timor Leste, untuk menyederhanakan keputusan-keputusan mengenai kebijakan luar negeri yang bersifat kompleks, melalui proses pemilahan terhadap berbagai alternatif kebijakan luar negeri menjadi dua jenis, yaitu alternatif kebijakan yang ditolak berdasarkan dimensi kritis, serta alternatif kebijakan yang diterima dengan penerimaan keuntungan semaksimal mungkin serta pengurangan risiko-risiko seminimal mungkin yang terjadi dari implementasinya (Mintz, 1997, Mintz & DeRouen, 2010, Mintz & Sofrin, 2017).

Memang, menurut sejarah, ada kesamaan antara proses masuknya Timor Leste ke dalam ASEAN dan proses masuknya Indonesia ke dalam institusionalisme ASEAN, bahkan ikut terlibat sebagai sebagai pendiri ASEAN Perlu diketahui, menjelang pendirian ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh Deklarasi ASEAN di Bangkok, Asia Tenggara baru saja melewati krisis diplomatik dan agresif yang disebut sebagai Konfrontasi Indonesia-Malaysia yang terjadi akibat dari keputusan Presiden Soekarno (Ahmad, 2016, Mahbubani & Sng, 2017). Usman bin Haji Muhammad Ali dan Harun bin Said, prajurit dari sebuah lembaga militer negara Indonesia yang sekarang bernama Korps Marinir Republik Indonesia, yang baru saja melaksanakan operasi peledakan MacDonald House di Singapura pada tanggal 10 Maret 1965, tertangkap oleh Pemerintah Singapura tiga hari setelah hari peledakan, diadili baik oleh Pengadilan Tinggi Singapura pada tanggal 20 Oktober 1965, maupun oleh Mahkamah Persekutuan Malaysia pada tanggal 5 Oktober 1966,

dan diputuskan untuk digantung pada tanggal 17 Oktober 1968 (National Library Board of Singapore, 2014). Ketika jenazah Usman dan Harun sampai di Jakarta, sekelompok 400 mahasiswa menyerbu kedutaan Singapura di Indonesia dan kediaman diplomat Singapura menggunakan tongkat bambu selama kurang dari satu jam, dengan alasan kekesalan karena mereka menganggap kedua orang itu hanya menjalankan perintah dari pihak-pihak pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno (National Library Board of Singapore, 2014). Para oknum mahasiswa tersebut juga menghancurkan furnitur dan jendela, serta merobek bendera dan lambang negara Singapura. Para penyerang membutuhkan waktu kurang dari satu jam sebelum mereka kemudian pergi ke gedung di mana jenazah kedua orang itu disemayamkan (National Library Board of Singapore, 2014). Semua berubah ketika pada bulan September 1970, saat Pertemuan Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok di Lusaka, Zambia, ketika Presiden Soeharto menemui Perdana Menteri Singapura saat itu, Lee Kuan Yew, selama 30 (tiga puluh menit) untuk membicarakan tentang perkembangan regional Asia Tenggara, dan menemukan banyak kesepahaman pandangan (Lee Kuan Yew, Mahpudi, Anita Dewi Ambarsari, et al., 2011). Momen tersebut ditandai oleh Pemerintah Singapura sebagai momen peningkatan hubungan bilateral Singapura dan Indonesia, dan turut berhubungan dengan kedatangan Perdana Menteri Lee ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, saat berkunjung ke Jakarta pada bulan Mei 1973. Pada saat itu, Perdana Menteri Lee menaburkan bunga di makam Usman dan Harun sebagai tanda niat baik (National Library Board of Singapore, 2014). Isyarat ini dipuji oleh pers Indonesia dan akhirnya membawa hubungan bilateral yang lebih baik antara kedua negara, yang kemudian memengaruhi banyak program seperti program penanaman modal asing serta bantuan-bantuan teknis asing dari para pengusaha Singapura yang dimulai sejak bulan Agustus 1974 serta program pengembangan kota Batam yang dilakukan sejak tahun 1976 (Lee, Mahpudi, Ambarsari, et al., 2011). Setelah peristiwa tersebut, Singapura, bersama-sama dengan Malaysia, kemudian bersama-sama dengan Indonesia, bergabung dan ikut serta dalam organisasi ASEAN sampai sekarang.

Sebagai penutup, Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Timor Leste dalam partisipasi pertama negara Timor Leste sebagai pengamat (*observer*) dalam *the*

32nd ASEAN Coordinating Council Meetings di Jakarta, Indonesia, telah menyatakan perasaan terhormat untuk dapat mengambil bagian dalam pertemuan yang diadakan oleh ASEAN itu, di bawah kepemimpinan Indonesia (Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Timor Leste, 4 Februari 2023). Selain itu, Pemerintah Timor Leste juga mendukung program keketuaan ASEAN oleh Indonesia pada tahun 2023 dalam tema *ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*, di mana Timor Leste mendukung visi ASEAN dalam kepemimpinan Indonesia sebagai pusat stabilitas dan pertumbuhan di dalam kawasan Asia Tenggara bahkan Asia Pasifik secara umum (*the centre of gravity to safeguard stability and growth in the region*) berdasarkan kepada kesamaan kepentingan dan tantangan serta tanggung jawab kepada kawasan Asia Tenggara (Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Timor Leste, 4 Februari 2023).

Selanjutnya, dalam Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN (*ASEAN Summit*) ke-42 (keempat puluh dua), yang diadakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, Perdana Menteri Timor Leste, Taur Matan Ruak, juga menyampaikan rasa syukurnya atas nama Pemerintah Timor Leste atas dukungan seluruh negara anggota ASEAN, khususnya kepada Pemerintah Indonesia, sebagai pemegang keketuaan ASEAN untuk tahun 2023 dan pada pertemuan tersebut, sekaligus Pemerintah Kamboja, sebagai pemegang keketuaan ASEAN untuk tahun 2022 serta pada Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN (*ASEAN Summit*) ke-40 (keempat puluh) dan ke-41 (keempat puluh satu) di Phnom Penh, Kamboja, terhadap kebijakan luar negeri Pemerintah Timor Leste untuk segera menjadi negara anggota ASEAN, serta kesempatan untuk dapat mengikuti Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN (*ASEAN Summit*) ke-42 (keempat puluh dua) tersebut sesuai amanat penerimaan secara prinsip (*in-principle admission*) negara Timor Leste di dalam ASEAN pada Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN (*ASEAN Summit*) ke-40 (keempat puluh) dan ke-41 (keempat puluh satu) di Phnom Penh, Kamboja. Melalui pandangan Perdana Menteri Taur Matan Ruak, Pemerintah Timor Leste juga telah berkomitmen untuk segera memenuhi kewajibannya untuk mempersiapkan diri sebagai anggota penuh ASEAN sesuai dengan peta jalan yang telah disepakati. Selain itu, Pemerintah Timor Leste juga akan berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai dan norma-norma

yang ada di dalam ASEAN serta memelihara kesatuan ASEAN (Sekretariat Presiden Republik Indonesia, 2023).

VI.2 Saran

Selama penelitian ini, peneliti telah menemukan banyak hal yang positif terkait dengan dunia diplomasi masing-masing negara, baik itu Timor Leste maupun Indonesia, dari beragamnya data diplomasi kedua belah pihak selama tahun 2018 hingga tahun 2022. Peneliti mengharapkan agar kualitas diplomasi kedua negara, Timor Leste dan Indonesia, secara umum, dapat tetap berada di level yang sama seperti saat penelitian ini dilakukan dan karya ilmiah ini disusun. Secara khusus, peneliti juga mengapresiasi kinerja Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Timor Leste yang telah bekerja untuk menangani kepentingan nasional yang sedang dihadapi oleh masyarakat Timor Leste dengan semangat yang profesional dan tetap menjunjung tinggi perdamaian dan visi untuk masa depan, baik terkait dengan hubungan diplomatik antara negara Indonesia dan negara Timor Leste beserta dengan bangsa Indonesia dan masyarakat Timor Leste, maupun dengan langkah politik luar negeri yang sedang ditempuh oleh Pemerintah Timor Leste sejak tahun 2001 secara wacana maupun sejak tahun 2011 secara resmi, hingga pencapaian yang terjadi pada tahun 2022, yang akan semakin menguatkan arah kepada proses penerimaan Timor Leste sebagai anggota tetap dan penuh ASEAN di masa depan.

Namun, selama proses penelitian ini pula, khususnya dalam proses pengumpulan data, peneliti menemukan berbagai masalah terkait dengan komunikasi dan keterbukaan informasi mengenai fenomena diplomatik ini. Peneliti cukup heran dengan rendahnya keterbukaan informasi dari pihak-pihak yang langsung berkepentingan seperti Kedutaan Besar Timor Leste di Jakarta dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili, Timor Leste, seperti menolak untuk kemungkinan adanya wawancara dengan peneliti terkait dengan fenomena diplomatik tersebut. Peneliti menganggap bahwa rendahnya keterbukaan informasi semacam itu sangat merugikan bagi dunia akademis, dan berpotensi merugikan citra diplomatik Timor Leste dan Indonesia secara umum di mata dunia. Padahal, fenomena diplomatik ini bukanlah sebuah fenomena diplomatik yang benar-benar

kontroversial, tidak seperti citranya yang muncul pada publik di luar lembaga-lembaga yang bersangkutan, terutama seperti yang ditonjolkan oleh lembaga-lembaga pers dan media-media massa lainnya. Peneliti mengharapkan kepada pihak-pihak yang terkait di dalam Pemerintah Timor Leste dan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut di masa depan.

Dengan demikian, maka peneliti mengajukan saran-saran yang dapat dicermati berdasarkan penelitian ini.

VI.2.1 Saran Teoretis

Peneliti menyarankan kepada insan akademik studi hubungan internasional untuk memperbanyak kajian mengenai hubungan antara keberadaan sebuah negara yang dianggap mempunyai *power* yang dapat diperhitungkan dengan pengembangan multilateralisme dan regionalisme dalam ruang lingkup diplomasi, seperti yang terjadi di dalam Indonesia.

VI.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti menganggap bahwa setiap negara yang pernah berkonflik dapat menjalani hubungan kerja sama yang harmonis dan berdampak, bukan hanya untuk kedua negara, tapi juga untuk seluruh kawasan, apabila terjadi kesepakatan regional, melalui kegiatan diplomasi. Oleh karena itu, peneliti mendorong agar pengembangan diplomasi dapat diprioritaskan dalam pengambilan kebijakan politik luar negeri suatu negara-bangsa (*nation-state*).